

Fenomena K-Pop di Arab Saudi: Pengaruh Reformasi Sosial terhadap Otoritas Keagamaan

Ani Mariani

Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Konsentrasi Kajian Timur Tengah

e-mail : animarianirst@gmail.com

Abstract

Saudi Arabia is often seen as a very conservative country because of the strong influence of Wahhabism in government, an ideology that tends to be perceived as anti-modernity. The role of the ulama has also been considered very strong in determining state policy. However, since 2016, there have been significant social changes in freedom and leeway granted by the state in various sectors, especially in the social sector. Women are allowed to enter sports stadiums, drive, travel without a guardian. This change also includes providing concessions for entertainment such as music concerts, including what is quite surprising is the entry of the K-Pop phenomenon in Saudi. This policy created debate among various groups, especially among Wahhabi clerics. This article aims to analyze the emerging impact of the social reform process in Saudi Arabia on religious authorities in the country. This study uses a qualitative method by conducting a literature study. This article uses the concept of religious authority and its relation to the digital communication proposed by Cheong (2011). The results showed that social reform in Saudi Arabia affected the dynamics of religious authority, and there was a shift in authority from traditional authorities, such as ulama, to civil authorities.

Keywords: *K-Pop, religious authority, Saudi Arabia, social reformation, Vision 2030*

Abstrak

Arab Saudi sering dipandang sebagai negara yang sangat konservatif karena kuatnya pengaruh ideologi Wahabisme dalam pemerintahan, sebuah ideologi yang cenderung dipersepsikan sebagai paham yang anti modernitas. Peran ulama juga selama ini dinilai sangat kuat dalam menentukan kebijakan negara. Akan tetapi, sejak tahun 2016, terjadi perubahan sosial yang besar berupa kebebasan

dan kelonggaran yang diberikan negara di berbagai sektor, terutama di sektor sosial, di antaranya: perempuan diperbolehkan memasuki stadion olahraga, menyetir, bepergian tanpa wali. Perubahan ini termasuk pula memberi kelonggaran hiburan seperti konser musik, termasuk yang cukup mengejutkan adalah masuknya fenomena K-Pop di Saudi. Kebijakan ini menciptakan perdebatan di antara berbagai kelompok, terutama di kalangan para ulama Wahhabi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang muncul dari proses reformasi sosial di Arab Saudi terhadap otoritas keagamaan di negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori otoritas keagamaan dan kaitannya dengan komunikasi digital yang dikemukakan oleh Cheong (2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi sosial di Arab Saudi memengaruhi dinamika otoritas keagamaan dan terjadi pergeseran otoritas dari otoritas tradisional, seperti ulama, menjadi otoritas sipil.

Kata kunci: Arab Saudi, K-Pop, otoritas keagamaan, reformasi sosial, Visi 2030

Pendahuluan

Arab Saudi telah merancang sebuah program bernama Visi 2030 (Vision 2030) yang diumumkan pada 25 April 2016. Visi 2030 dirancang oleh Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan (the Council of Economic and Development Affairs) yang diketuai oleh Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Visi 2030 mencakup sejumlah tujuan dan strategi reformasi untuk keberhasilan ekonomi jangka panjang Kerajaan, termasuk pengurangan subsidi, penciptaan dana kekayaan berdaulat, membuka Saudi Aramco untuk investasi swasta melalui IPO parsial, dan reformasi untuk beberapa industri termasuk pariwisata dan pertahanan (saudiembassy.net, t.t.).

Visi tersebut dirancang untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang selama ini bergantung sepenuhnya kepada sektor minyak dan gas. Selama ini, dengan prosentase sebesar 70%, sektor minyak merupakan sumber pendapatan utama terbesar Arab Saudi (Hikmah, 2019: 29). Namun sejak 2014, harga minyak jatuh tak terkendali, dari semula 115 Dollar AS per barel pada bulan Juni 2014, anjlok ke angka 44 Dollar AS per barel pada November 2015. Merosotnya harga minyak membuat Arab Saudi menghadapi defisit ekonomi karena di saat yang sama, Saudi sedang melakukan agresi militer ke Yaman dan mendukung sejumlah milisi bersenjata yang memerangi pemerintah Suriah. Perang-perang ini berbiaya sangat besar dan hal ini membuat Saudi defisit lalu memakai cadangan devisanya sebesar 10 miliar Dollar AS per bulan untuk membayar anggaran

belanja. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah Saudi untuk mencari sumber pendapatan non-migas (Yulianti, Haryadi, dan Sulaeman, 2019: 194).

Visi ekonomi 2030 Saudi menetapkan tujuan untuk memperbaiki perekonomian melalui agenda kebijakan yang dikenal sebagai rencana transformasi nasional yang mengarahkan Saudi untuk melepaskan kebergantungannya kepada minyak, sekaligus membawa Saudi ke arah yang lebih moderat (Hidriyah, 2016: 6). Perubahan yang ingin dilakukan oleh para elit secara langsung tidak hanya akan berdampak pada sektor ekonomi, melainkan meluas pada sektor sosial, pendidikan dan budaya (Hidriyah, 2016: 5). Terobosan reformasi nasional di bidang sosial, seperti lebih dibukanya ruang publik bagi perempuan, mulai terlihat, ditandai dengan diperbolehkannya perempuan untuk memiliki SIM dan menyetir mobil sendiri. Kaum perempuan juga dibolehkan untuk melakukan perjalanan tanpa harus didampingi oleh wali. Sejak 2017, kaum perempuan diizinkan untuk memasuki King Fahd Stadium (Kompas.com, 2019). Kemudian, pada bulan April 2018, Kerajaan Saudi memberikan lisensi terhadap industri bioskop untuk beroperasi (Agiesta, 2019) dan mengizinkan perempuan untuk masuk bioskop (Wafi, 2018: 231).

Putra Mahkota Pangeran Mohammad bin Salman (MbS) meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi di Saudi akan terjadi jika dilakukan reformasi sosial di negaranya (Hasan, 2017). Fokus reformasi dalam Visi 2030 adalah ekonomi. Akan tetapi, upaya ke arah target ekonomi itu harus disertai dengan kebijakan mempercepat perubahan sosial secara mendalam. MbS berulang kali mengatakan bahwa tanpa reformasi sosial, rehabilitasi ekonomi akan gagal (Todman, 2019). Secara ekonomi, menurut MbS, Saudi membutuhkan sumber daya yang besar, dan upaya ini akan gagal jika tidak didukung oleh reformasi sosial yang luas (Chulov, 2017). MbS juga menyatakan bahwa reformasi sosial itu diperlukan secara politis. Reformasi sosial akan meningkatkan jumlah perempuan dalam angkatan kerja, meningkatkan reputasi Saudi di luar negeri, menunjukkan keterbukaan Saudi dan modernisasi masyarakat Saudi, serta menarik pariwisata dan investor asing (Bogani, 2019).

Dalam sebuah wawancara dengan The Guardian, MbS menyatakan bahwa paham ultra-konservatisme Saudi merupakan hambatan utama visi 2030 dari segala sektor. Reformasi menurutnya sangat mutlak diperlukan guna mendatangkan investor asing. Menurutnya, investor tidak akan tertarik jika Saudi masih dalam ruang lingkup ekstremisme (Chulov, 2017). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Visi 2030 diluncurkan ketika Arab Saudi tengah terlibat dalam Perang Suriah. Pada tahun 2013, ISIS dideklarasikan dan milisi teroris ini melakukan aksi-aksi terornya ke berbagai penjuru dunia, tidak hanya di Irak dan Suriah. Hal ini menyebabkan dunia internasional khawatir, termasuk Uni Eropa. Pada tahun 2013, laporan Parlemen Uni Eropa secara

eksplisit menyatakan bahwa di Arab Saudi ajaran Wahabisme atau salafisme yang tersebar luas di Arab Saudi merupakan sumber ideologi terorisme. Pandangan dunia internasional semacam itu membuat Arab Saudi harus menggeser identitasnya dari “negara radikal” menjadi negara yang lebih moderat agar investor mau menanamkan modalnya di Saudi dan semakin banyak turis mancanegara yang memilih berwisata ke negara tersebut (Yulianti, Haryadi, dan Sulaeman, 2019: 194). Pangeran MbS mengatakan, negaranya terus berusaha menyingkirkan ekstremisme dan terorisme tanpa perang saudara, dan tanpa menghentikan negara untuk berkembang (BBC, 2020).

Selama ini, Saudi dinilai sebagai negara yang gagal menciptakan keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan, baik dalam kehidupan rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, hingga hak pilih suara (Rosida, 2018: 91). Hampir semua hak perempuan Saudi di bidang-bidang tersebut terampas akibat adanya aturan pemaksaan kaum agamawan dan pemerintah Saudi. Kaum perempuan diposisikan sebagai pihak yang harus menaati otoritas kaum laki-laki dalam menjalankan rutinitas kehidupan sehari-hari. Mereka juga tidak punya tempat di ranah publik (Rosida, 2018: 82).

Dengan berbagai pertimbangan yang telah disebutkan di atas, MbS pun menggelar kebijakan baru yang dimulai dengan mencabut larangan mengemudi bagi perempuan dan diikuti oleh langkah-langkah lain guna melonggarkan pembatasan atas kaum perempuan. Bahkan, baru-baru ini, seorang ulama menyarankan bahwa perempuan tidak lagi diharuskan mengenakan abaya (baju kurung panjang) dan niqab (cadar) saat tampil di muka umum (Feierstein, 2018). Pemerintah Saudi juga melakukan penangkapan-penangkapan kepada para ulama garis keras yang dituding menyebarkan radikalisme, misalnya Syaikh Nassar al-Omar pada tahun 2018 (BBC, 2018).

Visi 2030 memiliki tiga tema utama, yaitu masyarakat yang dinamis, ekonomi yang berkembang, dan bangsa yang ambisius (a vibrant society, a thriving economy and an ambitious nation). Untuk mencapai masyarakat yang dinamis, di antara program yang dilakukan Arab Saudi “mempromosikan pertumbuhan peluang budaya dan hiburan” (saudiembassy.net, t.t.). Di antara langkah reformasi yang dirumuskan oleh pemerintah di sektor sosial tersebut, terdapat hal yang menarik untuk dikaji, yaitu fenomena K-Pop di Arab Saudi, yang mulai bergulir sejak tahun 2019. Pada tanggal 12 dan 13 Juli 2019, Arab Saudi menggelar konser K-Pop dan itu menjadi sejarah baru bagi Saudi (cnnindonesia.com, 2019). Grup K-Pop pertama yang hadir di Saudi dan tampil di King Abdullah Sport City adalah Super Junior. Konser itu digelar dalam rangka World Tour ‘Super Show 7S’ dan sebagai bagian dari Jeddah Season (Republika, 2019). Setelah itu, digelar pula konser pada 11 Oktober 2019 dengan menampilkan boys groups BTS (Bangtan Sonyeondan). BTS menjadi penyanyi K-Pop pertama yang tampil solo di King

International Stadium dan mereka diundang secara langsung oleh Mohammad Bin Salman (BBC, 2019).

Arab Saudi merupakan negara dengan persentase kaum muda yang sangat tinggi. Data menunjukkan, penduduk dengan usia di bawah 30 tahun mencapai 70%. Mereka memiliki akses tanpa batas ke platform media sosial seperti YouTube, Twitter, atau Instagram. Situasi ini memungkinkan mereka lebih banyak melihat seluruh dunia sehingga memiliki pandangan yang lebih terbuka serta menghendaki kebebasan sosial (Trofimov, 2019). Melihat hal itu, MbS memainkan kartu hiburan untuk mendapatkan dukungan dari generasi milenial, yaitu mereka yang berusia di bawah 30 tahun, demografi usia terbesar di Saudi.

Sebelum adanya Visi 2030, ketika orang Saudi ingin melepaskan diri dari kebosanan yang membatasi di dalam negeri, mereka tidak punya pilihan selain bepergian ke luar negeri. Bahkan jika ingin menonton konser, mereka harus pergi ke Bahrain, Dubai, Mesir dan negara lainnya. Namun saat ini, setelah adanya visi 2030, terjadi tren sebaliknya, yaitu orang-orang dari luar Saudi datang ke Saudi untuk menyaksikan berbagai hiburan dan konser. Orang-orang yang awalnya menolak perubahan kini telah menikmati perubahan tersebut (Trofimov, 2019). Melalui program reformasi sosial ini, MbS tampaknya menemukan basis yang kuat untuk membangun legitimasinya, yaitu dukungan dari kaum milenial. MbS dilihat sebagai cerminan Arab Saudi yang modern, yang lebih kekinian dan mewakili generasi milenial Arab (Saju, 2017).

Masuknya K-Pop di Arab Saudi menunjukkan bahwa negara itu tidak bisa menghindar dari pengaruh dunia baru di era globalisasi yang membuat setiap negara bisa ditembus dari luar, tanpa batas, tidak lagi disekat oleh dinding-dinding ideologi, politik, dan ekonomi. Semua orang terintegrasi ke dalam sebuah jaringan komunikasi (Hamdi, 2013: 188). Jaringan adalah icon bagi dunia baru tanpa batas ini. Masyarakat diintegrasikan melalui sebuah jaringan informasi bernama world wide web (www). Globalisasi telah menyeret negara dan masyarakat ke dalam tatanan dunia yang serba terhubung, sehingga dalam era dunia baru ini, negara bukan lagi aktor penting. Peran ini sudah diambil oleh teknologi informasi dan aktor transnasional (Hamdi, 2013: 195).

Manuel Castells menyebut fenomena ini sebagai 'masyarakat jaringan' (Castells, 2004: 3) Ia mengemukakan bahwa saat ini masyarakat hidup dalam sebuah dunia di mana batas-batas teritorial dan identitas-identitas nasional dan identitas-identitas tradisional telah dirongrong oleh kekuatan-kekuatan aliran pengetahuan (Heywood, 2017: 257).

Sejalan dengan pemikiran Castells tentang masyarakat jaringan itulah Arab Saudi melakukan percepatan transformasi digital melalui pemanfaatan telekomunikasi dan teknologi. Rencana itu dituangkan dalam agenda nasional visi 2030 yang disahkan oleh Mohammad bin Salman pada tahun 2016. Jumlah pengguna internet di Saudi sebanyak 30 juta atau 89% dari populasi, sehingga penggunaan media sosial yang populer di kalangan orang Arab dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendapatkan feedback atas implementasi visi ekonomi 2030 melalui reformasi sosial (Noerhidajati, 2020).

Pergelaran K-Pop menunjukkan bahwa batas antara Saudi dengan Korea Selatan tidak lagi menjadi penghalang bagi perpindahan kapital. Fenomena K-Pop di Arab Saudi merupakan manifestasi yang konkret dari globalisasi ekonomi, dan semua itu dimungkinkan karena adanya teknologi informasi. Dalam situasi seperti itu, teknologi informasi modern mendesentralisasi otoritas keagamaan. Ruang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai pengetahuan, termasuk di dalamnya perdebatan tentang otoritas keagamaan tradisional, menjadi semakin terbuka. Hal ini tentu berpengaruh terhadap otoritas keagamaan tradisional. Masyarakat tidak lagi tersentralisasi pada suatu lembaga atau figur dalam mengakses pengetahuan keagamaan. Mereka kini memiliki banyak sumber alternatif lain dari kanal dan situs yang jumlahnya tak terhingga.

Dalam konteks Arab Saudi, ada beberapa studi terdahulu yang menunjukkan melemahnya otoritas keagamaan akibat modernisasi. Mahfud Hibatul Wafi, misalnya, memperlihatkan cita-cita reformasi Saudi sebagai upaya untuk mereduksi bentuk-bentuk “kekakuan” dalam sikap ekstremisme. Menurut Mahfud, reformasi Saudi ternyata bertentangan dengan otoritas keagamaan. Arus modernisasi disebut memengaruhi kultur keagamaan yang selama ini dibangun oleh Wahabi, dan arus tersebut dianggap bertentangan dengan corak Islam (Wafi, 2018).

Melanjutkan studi sebelumnya, tulisan ini memfokuskan perhatian pada dampak reformasi sosial terhadap pemangku otoritas keagamaan di Saudi. Reformasi sosial yang dimaksud dalam tulisan ini dibatasi pada masuknya fenomena K-Pop di Saudi. Pilihan ini dilandasi atas masuknya K-Pop di Saudi yang dinilai tidak sesuai dengan nilai dan normal sosial Saudi. Padahal, selama ini, Saudi dianggap sebagai jantung bagi dunia Islam. Sementara itu, pembahasan terhadap dampak K-Pop bagi otoritas keagamaan dilakukan untuk meninjau ulang pandangan Cheong (2011) tentang religious authority, yang mengatakan bahwa internet berimplikasi bagi otoritas agama, di mana bentuk-bentuk otoritas keagamaan diubah oleh teknologi digital, yang dianggap mengganggu dan menggantikan doktrin dan domain kepercayaan tradisional.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori otoritas

keagamaan dan kaitannya dengan komunikasi digital yang dikemukakan oleh Cheong (2011). Data dan informasi yang digunakan dalam penulisan artikel ini merupakan data yang diperoleh melalui berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, berita online, media sosial dan sumber-sumber lain yang terkait dengan pembahasan mengenai pengaruh reformasi sosial melalui Visi 2030 terhadap otoritas keagamaan di Saudi. Pembahasan selanjutnya adalah uraian mengenai konsep otoritas religius dan komunikasi digital, reformasi sosial dan masuknya K-Pop ke Arab Saudi, serta analisis mengenai pengikisan peran ulama di Arab Saudi.

Otoritas Religius dan Komunikasi Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dikenal dengan tiga revolusi informasi modern. Revolusi pertama mencakup perkembangan telegram, telepon dan radio. Revolusi kedua mencakup televisi, komputer generasi pertama dan satelit. Sedangkan revolusi ketiga mencakup kemajuan media baru, terutama telepon genggam, televisi kabel dan satelit, komputer yang lebih canggih, dan yang paling penting, yaitu teknologi internet. Revolusi informasi ketiga menjadi sangat signifikan dikarenakan ledakan yang luar biasa dalam jumlah pertukaran informasi dan komunikasi telah menandai lahirnya era reformasi menggantikan era teknologi. Pada gelombang ketiga ini, masyarakat ditransformasi menjadi sebuah 'masyarakat informasi', dan ekonomi ditransformasikan menjadi 'ekonomi pengetahuan' (Heywood, 2017: 256).

Sebelum munculnya media digital, otoritas ditandai dengan hubungannya yang kontroversial dengan perkembangan teknologi komunikasi. Meyrowitz (1985) mengilustrasikan fenomena masuknya televisi dengan mengatakan bahwa "otoritas melemah ketika sistem informasi digabungkan". Menurutnya, otoritas pemimpin berkurang ketika sebuah media memungkinkan orang yang berbeda untuk memiliki akses terbuka dan mendapatkan kontrol yang lebih besar atas pengetahuan dan informasi sosial. Masuknya teknologi berbasis web menciptakan dampak yang jauh lebih dahsyat terhadap otoritas agama.

Internet sebagai ruang yang terdesentralisasi dan bebas telah memfasilitasi perubahan dalam praktik keagamaan. Internet, sampai batas tertentu, telah memfasilitasi perubahan dalam struktur pribadi dan organisasi tempat para pemimpin otoritas agama menjalankan fungsi sosialnya. Konseptualisasi yang dominan adalah bahwa bentuk-bentuk otoritas keagamaan diubah oleh teknologi, dan hal ini dianggap mengganggu doktrin dan domain kepercayaan tradisional, yang sering kali tertanam dalam bentuk komunikasi hierarkis.

Dengan berkembang dan meningkatnya penggunaan teknologi komunikasi digital, sifat otoritas dalam keagamaan telah berubah, untuk memperoleh dan

memperluas pengaruh otoritas, para pemimpin agama telah menyesuaikan aktivitas sosialnya dengan menggunakan blogging, podcasting dan hyperlink (Cheong, 2011).

Cheong berusaha mendiskusikan fenomena tersebut dengan menghubungkan kompetensi dan pengaruh komunikasi dengan isu-isu kontemporer seperti aktivisme sosial, kohesi komunitas dan politik jaringan. Para otoritas agama tidak menganggap teknologi komunikasi digital sebagai sesuatu yang bertentangan dengan aktivitas mereka dalam memperluas pengaruh otoritas mereka, sebaliknya, mereka mengadopsi media untuk mengembangkan jangkauan dan visi mereka. Mereka memperkuat otoritasnya dengan menggunakan media sosial, seperti Facebook dan Twitter untuk menyebarkan pemahaman agama, bahkan gerakan sosial seperti yang dilakukan oleh Pendeta evangelis Rick Warren dan Bill Hybles, melalui media sosial mereka secara aktif menyerukan untuk mengatasi pemanasan global, kemiskinan dan buta huruf (Cheong, 2011). Maka dalam hal ini, teknologi komunikasi digital dianggap sebagai pendukung dan pelengkap praktik otoritas keagamaan serta merestrukturisasi legitimasi simbol dalam konteks kerja otoritas agama.

Namun di sisi lain, hubungan antara otoritas agama dengan internet dicirikan sebagai hubungan dislokasi, artinya, teknologi komunikasi digital dibingkai sebagai korosif dan mengganggu otoritas agama tradisional, menekankan pengikisan kekuatan lembaga dan pemimpin tradisional untuk mendefinisikan dan menentukan makna simbol agama (Campbell, 2017).

Penulis memandang bahwa dalam konteks Arab Saudi, teknologi informasi telah memosisikan warga negara untuk hidup dalam sebuah era yang disebut dengan 'masyarakat jaringan' yang mengakibatkan otoritas agama di Saudi terikikis oleh aktivitas modernitas yang mengharuskan Saudi mengubah arah politik dan ekonominya melalui kebijakan sosial yang diberlakukan oleh MbS.

Reformasi Sosial dan Masuknya K-Pop ke Arab Saudi

Mohammed bin Salman (MbS) sebenarnya bukan pemimpin pertama di Saudi yang melakukan reformasi. Raja Abdullah yang wafat tahun 2015 itu sendiri dikenal sebagai tokoh reformis (Rachmadie, 2017: 43). Reformasi yang dilakukan oleh Raja Abdullah dilakukan dalam rangka menyamaratakan peran masyarakat dan pemerintahan dalam hal politik, ekonomi, maupun sistem sosial (Rachmadie, 2017: 49). Raja Abdullah melakukan reformasi di Arab Saudi sejak 2005 hingga wafatnya tahun 2015. Beberapa reformasi sosial yang dilakukan Raja Abdullah di antaranya: pertama kalinya perempuan, yaitu Dr. Noura Al-Fayez, diangkat menjadi seorang pejabat di kabinet pemerintahan sebagai wakil menteri untuk pendidikan anak perempuan pada 2009 (Rachmadie, 2017: 52-53). Selanjutnya, Saudi mengadakan pemilu pertama untuk

memilih anggota-anggota yang akan menjabat di Dewan Pemerintahan Kota dan pemilu pertama bagi perempuan pada Desember 2015 (Rachmadie, 2017: 53). Kemudian pada tahun 2016, kabinet Arab Saudi telah meloloskan reformasi ekonomi secara menyeluruh, yaitu Visi Nasional 2030 yang digagas oleh MbS.

MbS menerapkan kebijakan yang berupaya untuk mengubah budaya Saudi yang konservatif menjadi lebih moderat, terutama dalam penerapan syariat Islam. Sejak 2016, reformasi norma dan nilai-nilai sosial telah direalisasikan melalui kebijakan pembatasan kewenangan polisi keagamaan dengan menempatkannya berada di bawah arahan raja (cnnindonesia.com, 2020). Perubahan kebijakan seperti itu, telah mendorong perubahan lainnya seperti berkurangnya kesenjangan gender dan memungkinkan perempuan memiliki kesempatan berperan dalam kehidupan publik seperti yang telah diterapkan sejak tahun 2017. Melihat fakta tersebut, MbS memandang bahwa reformasi sosial dan budaya yang berlangsung di Saudi saat ini merupakan langkah awal Saudi untuk menjadi negara moderat (cnnindonesia.com, 2020).

Fakta bahwa penduduk di Saudi yang menunjukkan sekitar 70% berusia dibawah 30 tahun dimanfaatkan oleh MbS untuk melakukan perubahan terutama dalam persoalan hak asasi manusia, anak muda, perempuan, dan isu gender. Sebagai contoh, terkait dengan kebijakannya tentang pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan, MbS memandang bahwa kebijakan kebebasan perempuan mengemudi dapat menjadi kunci reformasi sosial sekaligus dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam publik, utamanya dalam dunia kerja dan yang terpenting dapat mengurangi bahkan menghilangkan isu gender yang selama ini telah membatasi hak dan ruang gerak para perempuan Saudi (Hasan, 2017).

Selain itu, di Saudi, hampir sepertiga pemuda Saudi menganggur. Kaum muda urban di Saudi menuntut reformasi yang akan mengendurkan iklim sosial yang sangat ketat, terutama berkaitan dengan masalah gender. Karenanya, sebagai tanggapan dan upaya untuk menjawab tuntutan penduduk muda, urban, dan terdidik, MbS melakukan reformasi sosial, reformasi politik dan melakukan perubahan ekonomi untuk mengatasi berbagai tantangan negara (Chulov, 2017).

Menurut teori struktural fungsional, satu item sosial tertentu mempunyai konsekuensi tertentu terhadap operasi keseluruhan sistem sosial atau struktur sosial (Marzali, 2014: 34). Berdasarkan teori struktural fungsional tersebut, MbS melihat sebuah fenomena atau fakta sosial yang menarik di Saudi, misalnya terkait isu hak asasi manusia serta sumber daya minyak yang akan habis. MbS mempertimbangkan momentum ini dengan mengeluarkan visi 2030 untuk meminimalisir penggunaan

minyak dan mengalihkannya kepada kegiatan ekonomi lainnya sebagai jalan alternatif untuk pertumbuhan ekonomi Saudi.

Tentunya, setiap kebijakan yang telah dicetuskan oleh MbS sejauh ini telah menghasilkan pencapaian-pencapaian yang sebelumnya belum pernah terjadi pada era sebelum MbS. Di antaranya, MbS berhasil mengundang investasi dari AMC, perusahaan bioskop US yang berencana membuka 40 bioskop di 15 kota Saudi dalam waktu lima tahun, juga menarik perhatian investor perusahaan bioskop asal Dubai, VOX Cinema (kumparan.com, 2019).

Dalam wawancaranya dengan salah satu stasiun TV Saudi pada ulang tahun Visi 2030 yang kelima, MbS mengungkapkan banyak pencapaiannya. Ia mengatakan bahwa sekitar 60% orang Saudi sudah memiliki rumah pada tahun 2020. Pengangguran pada kuartal pertama 2020, sekitar 14%, dan pada kuartal ketiga tahun 2020 turun ke angka 12%. MbS juga melaporkan peningkatan pendapatan negara dari 66 Miliar Riyal Saudi menjadi 350 Miliar. Investasi asing meningkat tiga kali lipat menjadi 17 Juta Riyal Saudi per tahun. Pasar saham Saudi yang sempat macet antara 4.000 poin hingga 7.000 poin, sudah melampaui 10.000, yang berarti sektor swasta sudah mulai tumbuh. Ini adalah angka yang sangat besar dibandingkan dengan apa yang telah dicapai dalam empat tahun (arabnews.com, 2021).

Fenomena K-Pop sebagai media pertukaran budaya juga direncanakan oleh MbS sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembangunan ekonomi di Saudi, seperti perdagangan dan investasi. Fenomena seperti ini juga diharapkan akan menarik perhatian wisatawan sehingga dapat meningkatkan pengaruh ekonomi dan politik Saudi (Eun, 2017: 65). Budaya populer Korea pertama kali masuk secara resmi ke Timur Tengah pada tahun 2004 melalui drama TV Korea yang berjudul *Winter Sonata* yang sudah diterjemahkan oleh Layanan Informasi Luar Negeri (OIS) pemerintah Korea Selatan ke dalam bahasa Arab dan ditayangkan oleh televisi Mesir (Malik, 2019: 5735). Kemudian, drama tersebut mengudara di Iraq pada tahun 2005 (Malik, 2019: 5734). Drama menjadi pintu masuk masyarakat Arab untuk kemudian mengenal musik pop Korea atau dikenal dengan nama K-Pop. Teknologi digital khususnya berbagai platform media sosial di tahun 2010-an memfasilitasi penyebaran musik K-pop secara meluas di Timur Tengah (Malik, 2019: 5735).

Arab Saudi selama ini dianggap sebagai salah satu pasar Islam paling tertutup bagi artis-artis non-Islam, karena penegakan aturan dan praktik keagamaannya yang ketat. Tetapi, di bawah Visi Saudi 2030, Kerajaan Saudi meluncurkan Otoritas Hiburan Umum pada 2017 untuk mendorong sektor hiburan dan menamai tahun 2019 sebagai

"tahun hiburan". Di negara Islam konservatif itu, Visi 2030 dengan cepat membuka pintunya bagi bintang hiburan global (Young, 2019).

Pemanfaatan teknologi digital menjadi budaya baru, dan digitalisasi menjadi kunci bagi keberlangsungan ekonomi Saudi. Di antara negara-negara G-20, Kerajaan Arab Saudi dinilai yang paling serius dalam melakukan transformasi digital. Penilaian ini disampaikan oleh European Center for Digital Competitiveness dalam Digital Riset Report 2020 (Noerhidajati, 2020).

Pengikisan Peran Ulama di Arab Saudi

Secara historis, kerajaan Saudi tidak bisa dilepaskan dari kaum agamawan, khususnya kelompok Wahabi. Dalam sejarahnya, Saudi memang dibangun atas dasar persekutuan di antara tokoh agama bermazhab Wahabi dengan pemuka suku. Pada tahun 1744, Muhammad Ibn Abd al-Wahhab menyerukan adanya pemurnian kembali ajaran Islam. Gerakan ini dinamakan dengan gerakan "Wahabisme". Kemudian, Wahabi membentuk aliansi dengan Muhammad Ibn Al-Saud untuk menyebarkan doktrin Wahabi di bawah *House of Saud* untuk memerintah di seluruh suku Badwi di Semenanjung Arab. Setelah menang, kekuasaan dibagi menjadi dua bidang, yakni kekuatan politik untuk *House of Saud*, dan kekuatan agama untuk Abdul Wahhab (Alrebh, 2017: 4).

Di era modern, Arab Saudi tetap menjadi negara yang menempatkan agama dan politik sebagai dua hal yang tidak terpisahkan (Cho, 2019: 92). Al-Qur'an dan As-Sunnah disebut sebagai asas konstitusi negara. Maka, keterlibatan dan pengaruh ulama Wahabi dalam menentukan arah kebijakan internal dan politik luar negeri Arab Saudi tidak dapat dinafikan sehingga dalam penentuan sejumlah kebijakan, Saudi kerap menghasilkan kebijakan yang konservatif, yang selalu berdampak kepada mobilitas perempuan di ruang publik. Narasi agama masuk ke dalam berbagai kebijakan politik Saudi sehingga terdapat batasan-batasan yang tidak boleh disentuh oleh rakyat Saudi.

Karena Saudi merupakan negara dengan sistem pemerintahan monarki absolut, maka, selain otoritas agama, Saudi juga memiliki otoritas politik yang dipegang oleh para petinggi di istana kerajaan. Dalam struktur pemerintahan Saudi, otoritas agama, yaitu ulama, memiliki posisi sebagai penasihat di bidang syariat Islam bagi otoritas politik. Namun, hubungan antara otoritas politik dan otoritas agama tidak ditetapkan ke dalam konstitusi negara. Hubungan keduanya hanya didasarkan pada komitmen personal keluarga kerajaan terhadap pendapat-pendapat dan nasihat ulama (Fauzan, 2018: 59). Kebijakan negara pada dasarnya berasal dari otoritas raja dan semua tindakan raja harus berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan tradisi kerajaan. Setiap kebijakan harus memperoleh persetujuan dari keluarga kerajaan, para ulama, dan unsur-unsur lain

dalam masyarakat (Mubarok, 2017: 4). Karena itu, raja, syariat Islam, para ulama, dan tradisi Saudi telah membentuk kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan Arab Saudi (Mubarok, 2017: 5).

Keluarga Saud juga diuntungkan oleh kedudukannya sebagai pemilik dan penguasa dua kota suci umat Islam, yaitu Makkah dan Madinah. Mereka menikmati status sebagai negara yang dihormati secara internal dan eksternal, terutama di dunia Islam (Wahyudi, 2019: 18). Tentu saja, pengelolaan negara dengan warna agama sangat kental yang selama ini dianut oleh Saudi sangat sesuai dengan status Arab Saudi sebagai penguasa Makkah dan Madinah.

Namun, dunia mengalami perubahan. Tahun 2014 harga minyak jatuh sehingga membuat perekonomian Arab Saudi menghadapi kendala sangat serius. Masuknya modernitas di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, sebagai akibat dari adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, juga menciptakan tantangan yang harus disikapi dengan proporsional. Dalam hal ini, penguasa Arab Saudi kemudian menggelar program reformasi sosial.

Perubahan reformasi sosial tersebut tentu memengaruhi dinamika otoritas kegamaan, yaitu otoritas ulama Wahabi. Karena Saudi dipersepsikan sebagai salah satu pusat dunia Arab dan Islam, serta sebagai salah satu sumber rujukan ajaran Islam, maka perubahan apapun yang terjadi di Arab Saudi di bidang agama, berkemungkinan akan berpengaruh terhadap dunia Islam. Jika Saudi menjadi negara yang moderat, maka akan terjadi pula penyesuaian peran ulama. Globalisasi, modernitas, dan perkembangan teknologi informasi menciptakan pergeseran otoritas di negara tersebut, dari otoritas tradisional (kekuasaan para ulama) menjadi otoritas sipil. Pada gilirannya, situasi ini akan berimbas kepada dunia Islam.

Penulis melihat bahwa fenomena K-Pop di Saudi telah memberikan dampak negatif terhadap peran ulama di Saudi. Sejarah menunjukkan romantisme yang kuat di antara ulama Wahabi dengan Kerajaan Saudi sejak proses terbentuknya negara Saudi. Namun, hubungan ulama Wahabi dengan Kerajaan Saudi mulai berjarak sejak Mohammad bin Salman mencetuskan ide Visi 2030.

Cita-cita pemerintahan Saudi, khususnya melalui agenda Visi 2030 yang dipimpin MbS, untuk menjadi negara moderat telah direspon oleh para ulama dan menciptakan dinamika internal. Kelompok Islam konservatif dilaporkan menentang adanya reformasi konstitusi itu. Mereka menganggap reformasi tersebut mengancam nilai agama dan norma sosial masyarakat Arab Saudi. Mereka menilai para elit istana telah menentang konstitusi Saudi yang berbasis Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai (Mubarok, 2017: 8-9). Ide reformasi konstitusi juga ditolak oleh sayap konservatif dalam keluarga kerajaan,

dengan alasan bahwa reformasi akan mengarahkan Saudi kepada perubahan sistem politik menuju demokratisasi, di mana penguasa dipilih oleh rakyat, bukan lagi atas dasar penunjukan raja yang otomatis jika itu terjadi mereka akan kehilangan kekuasaan yang selama ini dinikmatinya. (Mubarok, 2017: 9). Di sisi lain juga, ada kelompok liberal yang mendukung reformasi Saudi serta mendukung visi nasional 2030 dengan dasar bahwa saat ini sudah seharusnya negara untuk beradaptasi dengan tren modernitas. (Mubarok, 2017: 10).

Dinamika respon dan perdebatan atas reformasi sosial juga muncul dalam menyikapi fenomena K-Pop di Saudi. Fenomena K-Pop telah memicu perdebatan di kalangan para ulama dengan berbagai respon. Otoritas agama tertinggi Saudi, yaitu Mufti Agung Sheikh Abdulaziz Al-Sheikh, misalnya, merespon kebijakan MbS tentang perizinan bioskop dan konser dengan menuliskan komentar yang ia publikasikan melalui situsnya. Ia mengatakan bahwa bioskop dan konser nyanyian itu berbahaya; tidak ada kebaikan apapun dalam pesta nyanyian tersebut. Bagi Al-Sheikh, film asing adalah produk budaya yang memalukan, tidak bermoral, ateis, busuk, dan mendorong terjadinya percampuran di antara lawan jenis. Dalam sebuah ceramah di program televisi minggunya, Al-Sheikh juga mengatakan bahwa pemerintah telah membuka pintu menuju kejahatan. Ia meminta pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan kelonggaran hiburan tersebut (Reuters, 2017).

Selain Al-Sheikh, ulama Saudi lainnya, Syeikh Prof. Umar Al-Muqlib, seorang profesor Hukum Islam di Universitas Qassim, juga mengkritik masuknya K-Pop ke Saudi dan konser yang telah diadakan di Riyadh. Al-Muqlib menilai bahwa unsur dalam konser musik K-Pop, yakni BTS, seperti gaya bernyanyi, tarian, dan kehadiran perempuan sebagai penonton dalam konser sangat bertentangan dengan budaya Saudi yang identik dengan Islam. Al-Muqlib mengatakan bahwa konser musik K-Pop dapat merusak budaya Saudi dan menghapus identitas asli masyarakat Saudi (Youtube.com, 2019).

Dalam merespon kritikan tersebut, MbS mengungkapkan dalam sebuah majalah bahwa ia telah mengadakan dialog dengan para ulama terkait rencananya ini. Menurut MbS, hanya sebagian kecil ulama yang terlalu dogmatis yang tidak setuju dengan kebijakannya. Adapun sebagian besar ulama menyetujuinya (Reuters, 2017). MbS juga merespon kritikan itu dengan tindakan hukum. Al-Muqlib yang mengkritik keras konser K-Pop akhirnya ditangkap dan dipenjara. Penangkapan ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari penangkapan sewenang-wenang terhadap para ulama terkemuka, para syaikh, dan pemikir bebas lainnya yang telah terjadi di Kerajaan selama dua tahun terakhir (voa-islam.com, 2019).

Simpulan

Dalam menghadapi berbagai tekanan ekonomi akibat jatuhnya harga minyak maupun semakin membesarnya anggaran militer, Arab Saudi telah melaksanakan reformasi ekonomi dan sosial, di bawah program Visi 2030. Di bawah tiga tema utamanya, yaitu masyarakat yang dinamis, ekonomi yang berkembang, dan bangsa yang ambisius (*a vibrant society, a thriving economy and an ambitious nation*), Visi 2030 diharapkan bisa memajukan perekonomian Saudi dan terlepas dari ketergantungan kepada minyak. Terkait tema pertama, yaitu “mencapai masyarakat yang dinamis”, Saudi melakukan upaya “mempromosikan pertumbuhan peluang budaya dan hiburan” serta berbagai reformasi sosial. Terhitung sejak tahun 2016, Saudi mengurangi kewenangan polisi keagamaan yang bertanggung jawab menegakkan ketaatan beragama serta moralitas publik, seperti misalnya memastikan cara berpakaian dan cara beribadah masyarakat sudah sesuai dengan syariat Islam, jika tidak maka polisi keagamaan menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar. Melalui kebijakan tersebut, MbS memandang bahwa reformasi sosial dan budaya merupakan langkah awal Saudi untuk menjadi negara moderat.

Langkah Saudi untuk melakukan reformasi sosial itu juga didasarkan kepada pertimbangan realistis adanya dinamika digital informasi yang telah mengakibatkan batas-batas suatu negara menjadi bias. Dalam konteks perkembangan digital informasi, aktor utama bukan lagi negara, melainkan teknologi digital yang melibatkan aktor-aktor transnasional. Fenomena revolusi digital termasuk di antaranya adalah masuknya budaya K-Pop ke tengah kaum muda Arab Saudi.

K-Pop dan berbagai aktivitas hiburan di Saudi seperti bioskop dan konser musik yang tadinya sangat dilarang, kini justru malah didorong oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian negara. Perkembangan ini mendapatkan penentangan keras dari banyak ulama, karena dianggap tidak sesuai dengan ideologi Islam. Penentangan keras tersebut muncul akibat dari faham Islam Wahabi di Saudi yang meyakini bahwa kegiatan hiburan seperti konser adalah aktivitas yang buruk dan haram. Akan tetapi, bagi pemerintahan Saudi, khususnya di bawah kendali MbS, program reformasi sosial tetap dilanjutkan. Bagi MbS, reformasi sosial adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari akibat perkembangan teknologi informasi.

Reformasi sosial yang diusung oleh pemerintah Saudi menciptakan pergeseran otoritas sosial di negara itu, dari yang tadinya dipegang oleh kaum agama dengan segala doktrin dan domain kepercayaan tradisionalnya, menjadi otoritas sipil. Menguatnya masyarakat sipil di Saudi juga berakibat kepada demokratisasi atas otoritas agama.

Daftar Pustaka

- Reuters. (2017). *Saudi Arabia's Religious Authority Says Cinemas and Song Concerts Harmful*. [online]. Dalam: <https://www.reuters.com/article/uk-saudi-entertainment-idUSKBN1511LL> [Diakses 18 Januari 2020].
- Alrebh, A, F. (2017). A Wahhabi Ethic in Saudi Arabia: Power, Authority, and Religion in a Muslim Society 2017. *Sociology of Islam*, 5(4), 278-302.
- Arabnews.com. (2021). *Full Transcript: Crown Prince Mohammed bin Salman interview with Saudi journalist Abdullah Al-Mudaifer*. [online]. Dalam: <https://www.arabnews.com/node/1850146/media> [Diakses 12 Februari 2021].
- BBC. (2018). *Ulama garis keras di Arab Saudi, Nassar al-Omar, ditangkap*. [online]. Dalam: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45164621> [Diakses 23 Januari 2021].
- BBC. (2019). *Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, Power Behind the Throne*. [online]. Dalam: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40354415> [Diakses 04 Juni 2021].
- BBC. (2020). *BTS: K-pop Band Perform in Saudi Arabia Despite Criticism*. [online]. Dalam: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50022766>. [Diakses 8 Maret 2021].
- Bogani, P. (2019). *The Paradox of Saudi Arabia's Social Reforms*. [online] PBS. Dalam: <https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-paradox-of-saudi-arabias-social-reforms/> [diakses 23 Februari 2020].
- Campbell, H, A. (2017). *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*. New York: Routledge
- Cho, J. N. K. (2019). Transforming Wahhabism in Saudi Arabia. *Torch trinity center for Islamic Studies Journal* [online]. Dalam: http://www.ttgst.ac.kr/upload/ttgst_resources16/20119-99.pdf [diakses 23 Februari 2020].
- Cheong, P.H. (2011). Religious Leaders, Mediated Authority, and Social Change. *Journal of Applied Communication Research*, 39:4, 452-454, DOI: 10.1080/00909882.2011.577085
- Chulov, M. (2017). I Will return Saudi Arabia to moderate Islam, says crown pince. *The Guardian*, [online]. Dalam: <https://www.theguardian.com/world/2017/oct/24/i-will-return-saudi-arabia-moderate-islam-crown-prince> [Diakses 19 Januari 2021].

- cnnindonesia.com. (2020). *Jejak Reformasi Arab Saudi dan Jalan Menuju Islam Modern*. [online]. Dalam: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201124160145-120-573909/jejak-reformasi-arab-saudi-dan-jalan-menuju-islam-modern> [Diakses 17 Maret 2020].
- cnnindonesia.com. (2019). *Konser di Arab Saudi, 'Super Junior' Cetak Sejarah*. [online]. Dalam: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190705190537-227-409549/konser-di-arab-saudi-super-junior-cetak-sejarah> [Diakses 22 Februari 2021].
- Eun, P, Y., dkk.(2017). Predicting Popularity of Korean Contents in Atab Countries Using a Data Mining Technique. *Journal of Distribution Science*, [online] 15(4), 33-40. Dalam: <https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201716463830265.pdf> [Diakses 29 Januari 2021].
- Fauzan, P, I., dan Fata, A, K. (2018). Model Penerapan Syaria'ah dalam Negara Modern: Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki dan Indonesia. *Journal Kajian Hukum Islam*, 12(1).
- Feierstein, J. (2018). Saudi Arabia: Liberalization, Not Democratization. *The Foreign Service Journal* [online]. Dalam: <https://www.afsa.org/saudi-arabia-liberalization-not-democratization> [Diakses 25 Februari 2021].
- Hamdi, A, Z. (2013). Agama di Tengah Jaring-jaring Dunia Modern. *Jurnal Studi Agama-agama*, 3(2).
- Hasan, A, M. (2017). *Membaca Arah Reformasi Sosial di Arab Saudi*. [online] Tirto. Dalam: <https://tirto.id/membaca-arah-reformasi-sosial-di-arab-saudi-czos>. [Diakses 11 Februari 2021].
- Heywood, A. (2017). *Politik Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hidriyah, S. (2016). *Reformasi Ekonomi Arab Saudi*. [online] DPR. Dalam: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-9-I-P3DI-Mei-2016-60.pdf [Diakses 20 Februari 2021].
- Hikmah, C, N., dan Abrar. (2019). "Saudi vision: Reformasi Ekonomi Arab Saudi." *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 1(1).
- Kompas.com. (2019). *5 Kebijakan Baru Arab Saudi untuk Perempuan, Boleh Menyetir hingga Jadi tentara*. [online]. Dalam: <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/14/063104365/5-kebijakan-baru-arab-saudi-untuk-perempuan-boleh-menyetir-hingga-jadi-tentara> [Diakses 16 Januari 2021].

- Malik, S, I. (2019). The Korean Wave (Hallyu) and Its Cultural Translation by Fans in Qatar. *International Journal of Communication*, 13.
- Marzali, A. (2014). Struktural-Fungsionalisme. *Jurnal Antropologi Indonesia*, [online] 30(2). Dalam: <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3558> [Diakses 27 Februari 2021].
- Mubarok, A, Z, S. (2017). Reformasi Konstitusi dan Yudisial dalam Bingkai Konstitusioanlisme di Arab Saudi. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2(1).
- Noerhidajati, S. (2020). Pencapaian Program Transformasi Digital Arab Saudi. *Kompasiana*, [online]. Dalam: <https://www.kompasiana.com/sri31642/5fbae7bfd541df6f89119a53/pencapaian-program-transformasi-digital-arab-saudi?page=3>. [Diakses 17 januari 2021].
- Rachmadie, C, T., dan Ediyono, S.(2017). Reformasi Sistem Kebudayaan di Arab Saudi Masa Pemerintahan Raja Abdullah (2006-2015). *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2(1).
- Rosida, A. (2018). Wacana Modernisasi dalam Tantangan Peradaban, Peran Perempuan sebagai Tonggak Sejarah Aarab Saudi. *Journal of Socal-Religion Research*, 3(1).
- Saudiembassy.net. (t.t.). *Vision 2030 is built around three primary themes: a vibrant society, a thriving economy and an ambitious nation*. [online]. Dalam: <https://www.saudiembassy.net/vision-2030> [Diakses 28 Februari 2021].
- Saju, P, B. (2017). *Arab Saudi dan Era Kaum Milenial yang Moderat*. *Kompas* [online]. Dalam: <https://www.kompas.id/baca/utama/2017/11/05/arab-saudi-dan-era-kaum-milenial-yang-moderat/> [Diakses 22 Januari 2021].
- Todman, W. (2019). *Is Saudi Arabia Undergoing a Social Revolution*. [online] CSIS. Dalam: <https://www.csis.org/analysis/saudi-arabia-undergoing-social-revolution>. [Diakses 26 Februari 2021].
- Voaindonesia.com. (2014), *Anjloknya Harga Minyak Dunia Tertajam di 2014*. [online]. Dalam: <https://www.voaindonesia.com/a/anjloknya-harga-minyak-dunia-tertajam-di-2014/2582337.html>. [Diakses 18 Januari 2021].
- Voa-islam.com. (2019). *Pemerintah Saudi Tangkap Ulama Suaikh Omar Al-Muqlib Karena Kritisi Konser Musik*. [online]. Dalam: <http://m.voa-islam.com/news/world-news/2019/09/12/67171/pemerintah-saudi-tangkap-ulama-syaikh-omar-almuqbil-karena-kritisi-konser-musik/> [Diakses 22 Januari 2021].

- Wafi, M, H. (2019). "Diskursus Reformasi Arab Saudi: kontestasi Kerajaan Saudi dan Wahabi." *Jurnal Islamic World and Politics*, 2(1).
- Wahyudi, N., Dkk. (2019). Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi. Dalam *Politik Islam Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab*. Jakarta: LIPI Press.
- Trofimov, Y. (2019). A Social Revolution in Saudi Arabia. *WSJ*, [online]. Dalam: <https://www.wsj.com/articles/a-social-revolution-in-saudi-arabia-11573833669> [Diakses 24 Februari 2021].
- Yulianti, D., Haryadi, P., dan Sulaeman, O. (2019). Pergeseran Identitas Arab Saudi Dan Proliferasi Terorisme . *Jurnal Review Politik*, 9 (1), 173-199.
- Young, P, C., dan Jaehyun, C. (2019). *BTS to Hold Solo Concert in Saudi Arabia*. [online] Pulse News. Dalam: <https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800028&year=2019&no=542163> [Diakses 25 Februari 2021].
- Youtube.com. (2019). "اعتقال الشيخ عمر المقبل". [online]. Dalam: <https://youtu.be/3MoczXb81GI><https://youtu.be/3MoczXb81GI> [Diakses 23 Januari 2021].